

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tuntutan reformasi yang mewarnai kehidupan demokrasi kita turut membangkitkan kembali semangat perjuangan emansipasi kaum perempuan di Indonesia dan kita dapat melihat bahwa perjuangan tersebut telah membuahkan banyak hasil. Dewasa ini perhatian kepada aspek emansipasi perempuan mulai mencuat kepermukaan baik pada tingkat nasional maupun local yang hampir merambah kesemua sector kehidupan, mulai dari kehidupan politik, hukum, ekonomi, agama, maupun sosial dan budaya. Berbagai kegiatan yang berhubungan dengan aspek perempuan telah berlangsung, baik dengan menggunakan pendekatan filosofis, yuridis, sosiologis maupun pendekatan agamis.

Disisi lain problema rendahnya kualitas sumber daya manusia secara nasional yang cukup mendasar adalah sumber daya kaum perempuan. Banyak kalangan yang menduga rendahnya sumber daya perempuan di Indonesia terjadi karena ketidakadilan, system social budaya tradisional yang lebih berpihak kepada kaum laki-laki, serta adanya penafsiran terhadap ajaran agama yang lebih menguntungkan dan menempatkan kaum laki-laki setingkat lebih tinggi dari kaum perempuan. Hal ini mengakibatkan sebagian kaum perempuan menjadi termarginalkan dan dieksploitasi oleh kaum laki-laki. Pada dasarnya peran dan posisi perempuan berkaitan erat dengan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku di dalam masyarakat. Perkembangannya sejalan dengan perkembangan norma – norma agama, adat istiadat, situasi ekonomi dan kondisi politik dari suatu negara

atau daerah yang bersangkutan. Namun demikian peran perempuan tetap terus diharapkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan.

Suatu pembangunan yang berhasil memerlukan perencanaan yang baik dan dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka melaksanakan roda pemerintahan dan proses pembangunan itu sendiri dimana factor yang paling menentukan dalam pembangunan ini adalah sumber daya manusia sebagai unsure pelaksana dan juga factor yang lain seperti financial sebagai modal utama.

Propinsi Riau merupakan daerah yang terus-menerus berbenah dan berkembang dalam melaksanakan pembangunan, apalagi setelah otonomi daerah bergulir dan seiring dengan itu maka Propinsi Riau memerlukan dukungan dari semua potensi sumber daya yang ada di Propinsi Riau untuk mewujudkan visi Riau 2020 yaitu "Mewujudkan Propinsi Riau sebagai Pusat Kebudayaan Melayu dan Ekonomi dalam Lingkungan yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin di Asia Tenggara Tahun 2020, termasuk dukungan dari perempuan parlemen Indonesia yang berasal dari Riau yang menjadikan dirinya ikut serta dalam mewujudkan visi Riau 2020 .

Sementara itu jika dilihat dari hasil sensus penduduk tahun 2000 jumlah penduduk perempuan Indonesia hampir setengah (49,7 %) dari seluruh penduduk Indonesia, sebenarnya kondisi ini merupakan potensi yang sangat besar dalam menunjang pembangunan sumber daya manusia. Namun dalam kenyataannya kondisi (kualitas) dan posisi (kedudukan/peran) perempuan Indonesia masih jauh tertinggal di berbagai bidang kehidupan terutama berkaitan dengan kesejahteraan seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan /pekerjaan, kedudukan dalam pengambilan keputusan / pemerintahan, dan perlindungan hukum di banding laki-

laki. Ketertinggalan tersebut terutama disebabkan oleh adat istiadat dan budaya yang bias gender dalam kehidupan masyarakat.

Walaupun iklim yang berkembang mulai memberikan peluang, banyak aspek berkaitan dengan faktor-faktor kultural dan sosial yang masih menghambat pengembangan kualitas hidup perempuan. Idiologi tentang peran “pantas “ bagi perempuan dan laki-laki juga mempengaruhinya dan diterjemahkan dalam aturan-aturan formal, dalam akses sosial yang berbeda-beda, dalam berbagai aspek budaya maupun dalam keyakinan dan pandangan individu.

Dilandasi permasalahan dan situasi kondisi tersebut, maka akan lebih menarik dan bermanfaat apabila dapat diperoleh gambaran dari pihak perempuan itu sendiri, terutama para remaja putri atau perempuan muda yang masih memiliki peluang besar untuk mengembangkan diri. Bagaimana aspirasi, harapan –harapan gambaran masa depan yang dicita-citakannya, bagaimana melihat dan mengolah aspirasi yang diinginkan tersebut dalam berbagai aspek kehidupannya, serta bagaimana kemudian menampilkan dirinya dan sebagainya. Hal ini agaknya menjadi suatu langkah yang penting karena perempuan seringkali menjadi pokok pembicaraan dalam berbagai pengambilan kebijakan baik yang mengikuti isu tentang pengembangan peran perempuan maupun isu-isu lain yang berkaitan dengan perempuan.

Disisi lain telah banyak kemajuan yang dicapai perempuan dalam pembangunan. Tetapi hasil pembangunan belum memberikan manfaat yang sama pada laki-laki dan perempuan, ditunjukkan dengan masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pendidikan dan ekonomi serta peran sertanya dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan dibandingkan laki-laki. Pembangunan adalah

upaya untuk meningkatkan kualitas hidup secara terus-menerus atau berkelanjutan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya pendukungnya, khususnya manusia sebagai potensi pokok pembangunan di samping sumber daya alam melalui perubahan tatanan lingkungan hidup serta kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya secara keseluruhan (laporan Komisi Mandiri Kependudukan Dan Kualitas Hidup, 2000). Dengan demikian, arti pembangunan mempunyai dimensi yang sangat luas meliputi berbagai bidang pembangunan, baik yang melakukan secara fisik dengan melakukan penyediaan berbagai sarana dan prasarana maupun dalam usaha meningkatkan kualitas hidup manusianya. Jadi tidak mudah mengukur hasil pencapaian pembangunan secara keseluruhan.

Beberapa indikator yang sering digunakan sebagai ukuran pencapaian hasil pembangunan adalah Human Development Index (HDI) dan Gender-related Development Index (GDI). Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa kedua indikator itu mempunyai berbagai keterbatasan. Indikator tersebut tidak dapat mengukur hasil pencapaian pembangunan secara menyeluruh. Oleh sebab itu, dalam menggunakan kedua indikator tersebut harus benar-benar dipahami konsep dan keterbatasan variabel yang digunakan dalam pengukurannya.

Pada kenyataannya ketidakadilan gender masih dihadapi oleh perempuan. Bentuk-bentuk ketidakadilan tersebut antara lain : pelabelan (stereotipe) yang kurang menguntungkan, multi beban, kekerasan, marginalisasi dan subordinasi. Karena itu pembangunan gender diarahkan agar perempuan dan laki-laki mempunyai kesamaan akses (peluang), partisipasi, kontrol dan kesamaan memperoleh manfaat pembangunan. Indeks pembangunan gender (Gender Development Index (GDI) merupakan salah satu indikator makro untuk melihat apakah terjadi kesenjangan gender dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti usia

harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pendapatan. Pada tahun 1999, GDI Indonesia masih sangat rendah, yaitu ada pada urutan 92 dari 162 negara. Peringkat ini dibandingkan negara-negara ASEAN sangat jauh tertinggal, misalnya : Malaysia, Thailand, dan Philipina masing-masing pada rangking ke 55, 58, dan 62. GDI Propinsi Riau pada tahun 2004 berada pada rangking ke 28 dari 33 provinsi di Indonesia. Indikator tersebut menunjukkan bahwa pembangunan yang dirancang secara “netral gender “ ternyata memberikan manfaat berbeda terhadap perempuan dan laki-laki. Untuk itu perlu dirancang kebijakan pembangunan yang responsif gender. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mencapai gender, dengan memperhitungkan perbedaan aspirasi, kebutuhan, kepentingan dan pengalaman perempuan dan laki-laki serta memperhatikan keterbatasan perempuan karena peran gendernya.

Sebagai contoh hasil Susenas 2004 memperlihatkan bahwa penduduk laki-laki Riau pada tahun 2004 berijazah lebih tinggi jika dibandingkan dengan penduduk perempuan . Tabel 1.1 memperlihatkan fakta tentang dampak kesenjangan gender masih terjadi.

Tabel 1.1 :
Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah / STTB
Tertinggi Yang Dimiliki Di propinsi Riau Tahun 2004

Jenis Kelamin	Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki			
	Tidak Memiliki	Pendidikan Dasar	Pendidikan Menengah	Pendidikan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	21,41	27,82	46,78	3,99
Perempuan	24,84	30,09	42,15	2,92
Laki-laki + Perempuan	23,11	28,94	44,49	3,47

Sumber Data : Jurnal Puanri, Mei 2006, PUSDATIN RIAU

Tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan kesempatan berpendidikan di Provinsi Riau masih ada meskipun perbedaan tersebut semakin mengecil. Salah satu penyebabnya adalah karena kemiskinan yang memberikan peluang lebih banyak kepada laki-laki untuk mengenyam pendidikan dibanding perempuan. Mitos yang berkembang bahwa laki-laki adalah pencari nafkah utama sehingga beralasan untuk diutamakan. Tentu mitos ini tidak benar, malah justru perempuan yang tidak berpendidikan menyimpan potensi yang lebih fatal.

Hasil survey Demografi Kesehatan Indonesia mencatat bahwa Angka Kematian Ibu tahun 2002/2003 adalah 307 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini relatif tinggi dan ada banyak faktor yang menjadi penyebab diantaranya pendidikan (faktor tidak langsung).

Perempuan yang mampu baca tulis relatif akan mudah menerima ilmu pengetahuan terutama pengetahuan kesehatan, pengetahuan tentang gizi dan pengetahuan menjaga kehamilan. Disamping itu dengan pengetahuan yang dimilikinya perempuan akan mampu menjaga dan merawat bayinya sehingga memperkecil Angka Kematian Bayi.

Upaya perubahan nasib kaum perempuan tidaklah memadai jika dilakukan hanya melalui upaya advokasi dan penyadaran dikalangan perempuan saja, namun harus masuk melalui sistem pengambilan kebijakan negara dengan menyuarkan aspirasi di parlemen.

Posisi perempuan di Dewan Perwakilan analog dengan posisi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang tentunya berimbang pada keanggotaannya dalam memerankan fungsi kedewaanannya yang belum seimbang dengan besarnya tuntutan masyarakat. (Maimanah Umar dalam wajah PPI, 2006 : ix)

Disisi lain peran DPD sangat lemah, belum sejalan dengan semangat

desentralisasi dan otonomi daerah, padahal kehadiran DPD sebagai lembaga legislatif diharapkan dapat berperan menjembatani dan memperjuangkan kepentingan daerah dan aspirasi masyarakat daerah dengan pusat dalam perumusan kebijakan Nasional. Namun karena peran dan wewenang DPD sangat lemah dalam UUD 1945, maka efektifitas dan hasil kerja DPD khususnya DPD asal Riau belumlah dapat memenuhi harapan masyarakat Riau.

Berdasarkan gejala diatas, kiranya perlu untuk dilakukan suatu penelitian tentang : Peran Perempuan Parlemen Indonesia Asal Riau Dalam Menunjang Pembangunan di Propinsi Riau

1.2. Perumusan Masalah

Dari gambaran tersebut diatas, maka dapat dikemukakan permasalahan yang dianggap penting untuk diteliti, yaitu

1. Bagaimana peran perempuan parlemen Indonesia asal Riau dalam menunjang pembangunan di Propinsi Riau
2. Faktor- faktor apa saja yang menjadi penghambat dari pelaksanaan peran perempuan parlemen Indonesia asal Riau dalam menunjang pembangunan di Propinsi Riau

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran perempuan parlemen Indonesia asal Riau dalam menunjang pembangunan di Propinsi Riau
2. Mengungkapkan faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi terhambatnya pelaksanaan peran perempuan parlemen Indonesia asal Riau dalam menunjang pembangunan di Propinsi Riau

1.4. Kontribusi Penelitian

Kontribusi dari penelitian ini adalah, sebagai berikut

1. Bahan masukan dari penulis dalam pengembangan ilmu tentang masalah pembangunan nasional.
2. Sebagai bahan informasi dan pedoman bagi Pemecahan masalah pembangunan nasional.
3. Diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi Pemerintah Prop. Riau dan perempuan parlemen Indonesia asal Riau dalam menanggulangi permasalahan pembangunan nasional.